

BAB III

PEMIKIRAN SUTAN SYAHRIR

A. Dalam bidang Kenezeragan (1945 - 1950)

Pada tanggal 19 Oktober 1945 diadakan Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mempunyai fungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang itu memilih Sutan Syahrir sebagai ketua dan Amir Syarifuddin sebagai wakil ketua.¹

Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin ditugaskan untuk menyusun anggota Badan Pekerja KNIP yang umumnya terdiri dari orang-orang yang aktif dalam gerakan bawah tanah selama pendudukan Jepang

Sebagai ketua Badan Pekerja KNIP, sesuai dengan Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945, Sutan Syahrir ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diwujudkan dalam Manifes Politik 1 Nofember 1945. Manifes itu ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Manifes politik tersebut merupakan pedoman di tingkat negara, di tingkat rakyat. Syahrir menulis sebuah brosur (buku kecil) yang diberi judul "**Perjuangan Kita**" yang dikutip oleh Syahbuddin Mandaralam.

¹Syahbuddin Mandaralam, Apa dan Siapa Sutan Syahrir, PT Rosda Jayaputra, Jakarta, 1986, hal. 42.

Sutan Syahrir mencoba menentengahkan gagasan untuk melepaskan pemuda bangsa Indonesia dari pengaruh fasisme Jepang, dengan menekankan bahwa perjuangan dan revolusi bangsa Indonesia adalah revolusi yang demokratis. Dan dia menjawab tuduhan pihak sekutu yang mencap kemerdekaan Indonesia sebagai hasil kerjasama dengan Jepang. Sutan Syahrir menolak anggapan sekutu yang menyamaratakan semua pemimpin Indonesia sebagai kolaborator dan penjahat perang.

Karena kekuatan sering dipergunakan oleh penguasa untuk suatu kepentingan si penguasa sendiri, terutama untuk mempertahankan kekuasaan yang ada ditangannya, Sutan Syahrir lebih lanjut mengemukakan:

Langkah pertama yang harus dilakukan didalam keadaan sekarang untuk memperbaiki dan mengubah keadaan selain dari menyusun segala kekuatan revolusioner yang sadar di dalam suatu susunan partai yang berdisiplin, memperbaiki secepat mungkin kedudukan Negara Republik Indonesia, dan mencegah merajalelanya kekacauan diantara rakyat dengan cara tersusun. Secepat mungkin seluruh "pemerintahan" harus demokratis, sehingga rakyat banyak masuk tersusun di dalam lingkungan pemerintahan . Ini mudah dikerjakan dengan menghidupkan dewan-dewan perwakilan rakyat.²

Pemuda memiliki kekurangan dalam soal politik, tulis Sutan Syahrir dalam "Perjuangan Kita" yang dikutip oleh Rudolf Mrazek, karena "selagi

² Ibid, hal. 43 - 47.

mereka dalam keragu-raguan, mereka tidak diberi pendidikan”, mudah-mudahan mereka akan belajar. “Pemuda” tentu saja harus diajari pemahaman yang sebenarnya dan perhitungan yang teliti tentang kenyataan-kenyataan dan potensi-potensi politik. Dengan belajar, pemuda tentu saja akan mengatasi ketergantungan “moral” mereka pada Jepang.³

Dalam “Perjuangan Kita” yang dikutip oleh Rudolf Mrazek, Sutan Syahrir menuntut “*mobilisasi semua kekuatan revolusioner yang sadar menjadi struktur partai yang berdisiplin*”. Dengan berbagai cara Sutan Syahrir merujuk pada “partai buruh demokratik”. Dengan panjang lebar dibahasnya buruh Indonesia, dan peran buruh Indonesia dalam revolusi yang akan datang. Menurut Syahrir,

buruh Indonesia harus menjadi pelopor perjuangan melawan imperialisme di Indonesia dan memperkuat perjuangan kelas buruh Internasional melawan kapitalis dunia.

“Kemajuan,” menurut Sutan Syahrir, tidak harus menyatakan “bahaya ledakan yang besar sekali.” Buruh, pelopor, agen utama dari perubahan, menurut Syahrir, harus “memperkuat perjuangan kelas buruh Internasional” melawan “kapitalis dunia’.

³Rudolf Mrazek, Syahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia, Yayasan Obor Mas, Jakarta, 1996, hal. 498.

40

Akan tetapi, dinegeri sendiri, mereka harus berjuang melawan "imperialisme" supaya memperoleh "kedudukan sekuat mungkin untuk mereka sendiri."⁴

Maklumat No. X, yang ditandatangani wakil presiden Moh. Hatta pada tanggal 1 Nivember 1945, antara lain menggariskan suatu kemauan politik untuk menempatkan Badan Pekerja KNIP sebagai badan yang menjalankan kekuasaan legislatif, sementara belum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sesuai dengan perangkat demokrasi yang dibutuhkan suatu Negara Republik.

Sutan Syahrir kemudian mengusulkan kepada pemerintah sebagai Badan Pekerja KNIP, agar rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan beberapa pembatasan. Agar segala keinginan rakyat dari berbagai golongan dapat menyalurkan keinginannya melalui partai-partai politik tersebut.

Kemudian, keluarlah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang juga di tandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta, agar rakyat membentuk partrai-partai politik sesuai dengan tuntutan demokrasi. Lahirlah 10 partai politik setelah keluarnya Maklumat tersebut, yaitu:

⁴*Ibid*, hal. 491-493.

1. Partai Masyumi, dibawah pimpinan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo.
2. Partai Komunis Indonesia (PKI), dibawah pimpinan Mr. Moh. Yusuf.
3. Partai Buruh Indonesia (PBI) < pimpinan Nyono.
4. Partai Rakyat Jelata, pimpinan Sutan Dewanis.
5. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), pimpinan Dr. Probowinoto.
6. Partai Sosialis Indonesia (PSI), pimpinan Amir Syarifuddin.
7. Partai Rakyat Sosialis (PRS), pimpinan Sutan Syahrir.
8. Partai Khatolik Republik Indonesia (PKRI),pimpinan I.J. Kasimo.
9. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai),pimpinan J. B. Assa
- 10 Partai Nasional Indonesia (PNI), pimpinan Sidik Djojokusarto ⁵

PSI Amir Syarifuddin dan PRS Sutan Syahrir dalam bulan Desember 1945 kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis Pada tanggal 14 November 1945, empat hari sesudah Surabaya dibombardir pasukan sekutu (Inggris), Sutan Syahrir diangkat sebagai perdana menteri yang pertama.⁶

Tindakan Sutan Syahrir yang pertama sebagai perdana menteri adalah membuat pernyataan politik kesetiakawanan pada perjuangan rakyat Surabaya, yang gigih mempertahankan kehormatan Republik Indonesia

⁵Syahbuddin Mandaralam, *opcit*, hal, 48

⁶*Ibid*, hal. 49.

Sampai bulan Juni 1947, Sutan Syahrir memimpin tiga kabinet, menghadapi kegiatan diplomasi, bertempur di meja perundingan melawan Belanda yang ingin menjajah kembali negeri ini.

Pemerintah Republik Indonesia dibawah Perdana menteri Sutan Syahrir, berusaha melaksanakan berbagai kebijaksanaan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sutan Syahrir melihat berbagai kenyataan obyektif yang belum memungkinkan Republik berbicara dengan bahasa militer. Berjuang dimeja perundingan guna memperoleh keuntungan politik, setidaknya adanya pengakuan kekuasaan de facto bagi Republik, merupakan salah satu alternatif. Negara tanpa wilayah kekuasaan yang efektif, merupakan sesuatu yang lebih dan merupakan impian kosong. Wilayah kekuasaan de facto tersebut harus ada, demi penggalangan kekuatan lebih lanjut.

Dalam situasi yang sulit dan kompleks, Sutan Syahrir telah berusaha meletakkan landasan politik yang wajar bagi suatu pemerintahan demokratis. Barangkali secara teoritis, berdasarkan kenyataan yang ada, mungkin tidak sesuai dengan perlawanan bersenjata. Sutan Syahrir berusaha menciptakan strategi jangka panjang. Dia tidak mau bertindak otoriter, meski kekuasaan berada dalam tangannya.⁷

⁷*Ibid.*, hal. 50.

Menurut Sutan Syahrir, negara tidak akan memperoleh kemajuan jika bangsa Indonesia tidak memperoleh keyakinan bahwa dasar kehidupan adalah penyelenggaraan kekayaan negara dan kemampuan rakyat serta bangsa Indonesia. Begitu pula sumber kehidupan untuk bangsa dan rakyat Indonesia terus-menerus pula ditambah jumlah serta ragamnya, serta diusahakan agar rakyat Indonesia menjadi produktif dan tidak lagi terdapat pengangguran. Semua itu haruslah menjadi tujuan pokok serta alasan hidup yang terutama untuk negara Indonesia.

Negara dan pemerintah harus menjadi alat masyarakat dan bangsa dalam usaha untuk memperoleh kemajuan dalam kehidupan. Oleh karena itu maju mundurnya kemakmuran didalam negeri, menjadi tanggungjawab negara dan pemerintahannya. Negara dan pemerintah sebaliknya harus mampu memikul tanggungjawab itu.

Perjuangan melawan imperialisme, menurut Sutan Syahrir yang di kutip oleh Rudolf Mrazek, pada hakekatnya ialah membangun jarak untuk memaksa segala macam gerakan dan dorongan politik sampai lemah, untuk menciptakan ruangan supaya didalamnya orang yang lemah relatif dapat bergerak bebas, ruangan tanpa kepentingan. Menurut "Perjuangan Kita".

Kaum kapitalis menilai perjuangan rakyat Indonesia dengan norma sederhana, perhitungan mereka ialah untung dan rugi. Selama Indonesia dikuasai oleh modal, kita harus memastikan

bahwa kira tidak memperoleh kebencian kapitalisme. Ini menyangkut negeri Indonesia yang dibuka untuk kegiatan ekonomi asing sejauh mungkin, selalu dengan syarat tidak merusak kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitu pula halnya dengan masuknya orang asing ke negara Indonesia.'

Dalam sebuah wawancara dengan koresponden Het Parool ditahun 1952, Sutan Syahrir mengatakan bahwa perbikan peri kehidupan di Indonesia merupakan syarat pertama.¹⁰

Cita-cita kemasyarakatan yang dihayatinya adalah masyarakat kemanusiaan. Syahrir menolak sikap totaliter dalam mengancam kelangsungan Republik Indonesia pada waktu kemerdekaan.

B. Dalam Bidang Pendidikan (1932 - 1934)

Pada awal tahun 1932, dalam usia 23 tahun, Sutan Syahrir aktif kembali dalam pergerakan Nasional di Indonesia. Di Jakarta, Sutan Syahrir membantu majalah "**Daulat Rakyat**" sebagai mana dianjurkan oleh Moh Hatta. Dalam konferensi akhir Februari 1932 di Yogyakarta, diputuskan untuk mendirikan sebuah partai baru dengan nama "**Pendidikan Nasional Indonesia**", yang populer dengan sebutan PNI - Pendidikan.¹¹

⁹Rudolf Mrazek, *opcit*, hal. 500.

¹⁰H. Rosihan Anwar, **Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional**, PT Pembangunan Jakarta, Jakarta, 1966, hal. 53.

¹¹Syahbuddin Mandaralam, *opcit*, hal. 22.

Sutan Syahrir mencurahkan tenaga dan pikirannya membantu PNI-Pendidikan itu. Akhir Juni 1932, Sutan Syahrir terpilih sebagai **Ketua PO PNI- Pendidikan**. Istilah PO disini adalah singkatan dari Pimpinan Oemoem. PNI- Pendidikan dibawah Sutan Syahrir sangat aktif membentuk kader-kader dan meningkatkan usaha dalam bidang pendidikan, demi kematangan dalam berpolitik.

Sutan Syahrir mengembangkan tema dalam serangkaian karangan yang ditulisnya untuk "**Daulat Rakyat**" di bulan Januari dan Februari 1932. Tiap badan politik, tulis Sutan Syahrir yang dikutip oleh Rudolf Mrazek

Harus terdiri dari bagian-bagian yang lepas, dan tiap bagian itu harus memiliki cara hidup sendiri. Kehidupan bagian-bagian yang lepas itu bisa diorganisasikan kedalam suatu kelompok yang lebih besar, tetapi hanya sejauh keinginan bagian-bagian itu untuk hidup sendiri tak cukup kuat.

"Perubahan itu perlu, tulis Syahrir. Perubahan terus menerus menunjukkan" dinamika sosial" dan karena adalah wajar dan progresif jika perubahan harus pecah "**menjadi dua atau tiga bagian, apa yang pada mulanya merupakan kesatuan** "

Hanya badan yang sanggup hidup sepenuhnya, berjuang dan menyediakan ruang bagi segenap bagiannya untuk juga hidup sepenuhnya, yang bisa dikatakan badan yang sempurna.¹²

¹²Rudolf razeck, *opcit*, hal. 142.

Sutan Syahrir dan Hatta percaya bahwa pendidikanlah yang mampu menangkap kelonggaran organisatoris demikian. Pendidikan Nasional Indonesia, kata Sutan Syahrir dalam satu pertemuan di Batavia di awal Maret 1932, **"Pertama-tama hendak mendidik, dan dengan demikian memetakan jalan menuju kemerdekaan"**. Menurut Sutan Syahrir inilah perbedaan antara pendidikan dengan partai-partai politik. Bagi Syahrir, tiap patriot Indonesia **"Bebas memilih diantara partai-partai yang ada"** sambil tetap menjadi pengikut setia dari pendidikan. Tujuan pendidikan, kata Sutan Syahrir, bukanlah untuk menciptakan agitasi. Tujuannya adalah **"untuk mambawakan kejernihan."**

Dikemudian hari dikatakan bahwa jurnal pergerakan itu mempunyai **sifat didaktis**.¹³ Pokok-pokok pembicaraan dalam "Daulat Rakyat" memang umunya bersifat pendidikan. Sedikit sekali berita dan laporan. Karangan-karangan mirip kuliah panjang menerangkan hukum-hukum sejarah, kapitalisme, pergerakan buruh, Marxisme, demokrasi dan pokok-pokok bahasan lainnya. Menurut Sutan Syahrir, Majalah "Daulat Rakyat" bertujuan mengembalikan pergerakan pada tempat yang benar

¹³Didaktis dari kata Yunani "didaktikas" yang berarti mampu memberikan pengajaran. Dalam dunia pendidikan, didaktisme menekankan metode mengajar dan memberi instruksi. Lihat di **Ensiklopedi Nasional Indonesia**, jilid 4, PT Adi Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 343

Menurut Sutan Syahrir, Pendidikan dan Kebudayaan tidaklah lain dari usaha suatu bangsa untuk membentuk budi yang baru bagi bangsanya, membentuk manusia yang baru yang akan sanggup mendirikan masyarakat yang lebih baik, mendirikan masyarakat yang lebih adil dan makmur daripada yang dialami sebelumnya. Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan akandapat memperbaiki jiwa dan budi pekerti bangsa Indonesia yang akan datang, menjamin kemajuan dan masa depan rakyat serta bangsa Indonesia.¹⁴

Dalam artikel di tahun 1932, Sutan Syahrir merumuskan tujuan pendidikan sebagai pencerahan politik. Dan dia menulis bahwa Pendidikan ada untuk membangun kepercayaan pada diri sendiri dan untuk mengatasi rasa malu. Menurutnya, tujuan pertama pendidikan seharusnya adalah pengajaran dan pendidikan anggota, jadi bukan tindakan politik langsung.¹⁵

C. Dalam Bidang Kemasyarakatan (1950 - 1959)

Meskipun Sutan Syahrir tidak lagi ikut dalam pemerintahan dengan partainya aktif dalam pendidikan politik untuk rakyat. Rakyat sebagai warga negara harus menyadari hak-haknya dan juga kewajibannya.

¹⁴Sutan Syahrir, *opcit*, hal. 239

¹⁵Rudolf Mrazek, *opcit, hal. 180.*

Kemerdekaan yang di nikmati oleh negara, tidak selalu langsung berarti adanya kebebasan bagi rakyat. Banyak bukti menunjukkan terjadinya berbagai tekanan politis dan psikologis terhadap rakyat, justru dalam suatu negara yang katanya merdeka.

Tujuan bangsa Indonesia didalam keadiala bersama itu adalah kebahagiaan serta kemuliaan seluruh bangsa Indonesia. Selalu dikemukakan oleh Sutan Syahrir bahwa nasionalisme Indonesia adalah berdasarkan kerakyatan serta keadilan sosial, dan dalam semua undang-undang dasar disebutkan kerakyatan serta keadilan sosial sebagai dua sila dari sila Pancasila itu

Memang benar bahwa menciptakan masyarakat baru itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengajak rakyat banyak dan bangsa Indonesia untuk memulai usaha mendirikan suatu masyarakat yang berdasarkan kerakyatan serta keadilan sosial adalah sama denhan mengajak memulai suatu usaha yang maha besar dan maha berat serta yang pasti akan memakan waktu yang bertahu-tahun mungkin berpuluh-puluh tahun. Mengajak rakyat dan bangsa Inonesia, memulai uasah seperti itu adalah sam pula dengan mengajak rakyat dan bangsa Indonesia untuk memeras keringat membanting tulang dan berhemat serta berkorban bertahun-tahun lamanya. Hal yang demikian itu memerlukan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia

mengubah pandangannya terhadap kerja serta cara-cara bekerja. Kerja dan bekerja haruslah mendapat tempat yang tertinggi dalam bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan kerakyatan dan keadilan sosial di dalam masyarakat kita haruslah kita dapat mencapai kemakmuran untuk dijadikan dasarnya. Kemakmuran itu adalah kemakmuran yang merata sesuai dengan jiwa kerakyatan dan keadilan sosial. Dia harus bersifat kemakmuran bersama. Maka mencapai kemakmuran seperti itu, mesti pula menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Di dalam mengurus soal-soal yang bersangkutan dengan kemakmuran, sangatlah jelas kegagalan bangsa Indonesia selama tahun-tahun setelah kemerdekaan ini. Di sini pulalah terletak salah satu pokok kekecewaan rakyat Indonesia umumnya.¹⁶

Kita harus pula menyadarkan rakyat Indonesia, bahwa rasa kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan sosial, hanya berarti serta dapat diwujudkan dengan sempurna, jika masyarakat Indonesia didasarkan pada kemakmuran bersama serta merata. Maka untuk mencapai masyarakat yang makmur, haruslah bangsa Indonesia mempunyai tujuan pula untuk menegakkan dasar-dasar kemakmuran bagi masyarakat yang baru itu.

¹⁶Sutan Syahrir, *opcit*, hal. 127-128.

Kerakyatan adalah pemerintahan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri untuk rakyat. Kerakyatan mesti mengandung hak-hak kemanusiaan yang berikut:

1. Hak tiap orang untuk mempunyai kehidupan pribadi sendiri dengan tiada diganggu oleh negara.
2. Persamaan tiap orang warga negara untuk hukum, apa juga turunannya, sukunya, laki atau perempuan, agamanya atau warna kulitnya.
3. Perwakilan rakyat dengan jalan pemilihan merdeka yang sama dan rahasia.
4. Pemerintah yang dilakukan oleh mayoritas, akan tetapi dengan mendukung hak-hak minoritas.
5. Pembuatan undang-undang yang dikuasai oleh perwakilan rakyat.
6. Pengadilan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah.

Kerakyatan harus dipertahankan terhadap serangan diktator serta totaliterisme. Kerakyatan memberikan hak untuk berdirinya lebih dari satu partai politik didalam satu negeri. Begitu pula kerakyatan menjamin hak oposisi. Akan tetapi kerakyatan berhak pula bahkan berkewajiban membela diri terhadap mereka yang menggunakan hak - hak kerakyatan untuk

Sosialisme, tulis Sutan Syahrir, akan menjadi kedewasaan umat manusia. Di tahun 1957, Syahrir menulis,

*Terdapat adanya ketidakadilan dan kurangnya rasa tanggung jawab yang paling tersebar di kalangan inteligensia kita, tidak adanya rasa kemanusiaan terhadap rakyat biasa yang masih tetap hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Keadilan bersama harus diimbangi dengan kebahagiaan dan kemuliaan seluruh bangsa Indonesia.*²²

Sesudah tahun 1958, Indonesia bagi Sutan Syahrir tampak "gaya Sukarnonya sebagai negara yang "dipimpin Sukarno", negara dengan "gaya Sukarno. "Tanpa Sukarno", kata Sutan Syahrir di tahun 1959,

*Orang Jawa tidak akan memiliki pimpinan yang efektif (kecuali ada tokoh sentral, mungkin seperti Sultan, yang tampil dan bersatu disekelilingnya). Tanpa pemimpin pusat kharismatik seperti itu, banyak orang dalam Partai Nasional Indonesia dan mungkin banyak dari Nahdlatul Ulama akan mengharapkan pimpinan dari Partai Komunis Indonesia.*²³

Sutan Syahrir kini hampir tidak dapat memahami Indonesia selain melalui Jawa dan Sukarno, rupanya sifat dasar Indonesia diukur dengan Jawa dan Sukarno :

²²Sutan Syahrir, "Pedoman Kehidupan". dalam Sosialisme Indonesia, Pembangunan : Kumpulan tulisan, Leppenias, Jakarta, 1982, hal 127.

²³Wawancara Syahrir dengan George Kahin, Jakarta, Februari/ Maret 1959, yang dikutip oleh Rudolf Mrazek, opcit, hal. 807

*Dalam keadaan sekarang, sulit untuk melukiskan partai nasionalisme dan agama di Jawa sebagai imbalan terhadap kekuasaan totaliter yang dikumpulkan di bawah kepemimpinan Sukarno. Karenanya sulit untuk memikirkan kemungkinan perubahan politik di Jawa melalui cara parlemen.*²⁴

Partai politik terkemuka dari sistem, seperti Partai Nasional Indonesia atau Nahdlatul Ulama, menurut Sutan Syahrir adalah “anak-anak Sukarno”.²⁵ Seperti biasa, Syahrir tetap kritis tentang Sukarno. Akan tetapi, sekarang lebih daripada sebelumnya, dia tampaknya percaya bahwa Sukarno benar-benar bertindak sebagai “dalang” dalam wayang kulit di tengah sebuah pertunjukannya.²⁶

Sutan Syahrir menulis di tahun 1958

*Hanya bila masyarakat Indonesia kembali kepada keyakinannya bahwa negara dan bangsa Indonesia sungguh bertujuan kesejahteraan dan keadilan, barulah jiwa rakyat dan bangsa akan tenteram lagi, dan semangat kepatuhan kepada pemimpin negara dipulihkan.*²⁷

²⁴Sutan Syahrir, “Peninjauan dan Penilaian”, dalam Sosialisme, Indonesia, Pembangunan, hal. 144-145.

²⁵Ibid, hal. 145.

²⁶Ibid, hal. 145.

²⁷Sutan Syahrir, “Peninjauan dan Penilaian”, hal. 150.